



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 060/ 178 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGOLAH DATA PENYUSUNAN DOKUMEN *ROAD MAP*
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*, maka perlu disusun *road map* sebagai rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas dokumen *road map* reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk tim pengolah data penyusunan dokumen *road map* reformasi birokrasi tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengolah Data Penyusunan Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 ;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengolah Data Penyusunan Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengolah Data Penyusunan Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi kondisi umum birokrasi pemerintah daerah dilihat dari tiga hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: pemerintahan bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja melalui pengisian lembar kerja penyusunan dokumen reformasi birokrasi;
 - b. mengidentifikasi kegiatan/rencana aksi yang harus dilaksanakan dalam rangka fokus perubahan reformasi, yang menyangkut 4 (empat) bagian :
 1. prioritas pembenahan manajemen pemerintahan daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi;
 2. prioritas yang harus terus dipelihara yaitu prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus;

- a) pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya;
 - b) kedua, *Quick Wins* yaitu pelayanan yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah, dapat dengan cepat dilakukan perubahannya, dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat/pemangku kepentingan (*stakeholders*), perubahan yang dilakukan memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat, sehingga memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah;
3. prioritas perangkat daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing perangkat daerah.
- c. melaporkan hasil identifikasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 melalui Kepala Perangkat Daerah masing – masing.

KETIGA : Tim Pengolah Data Penyusunan Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggungjawab kepada Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/ 178 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGOLAH DATA
 PENYUSUNAN DOKUMEN ROAD MAP
 REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA


SUSUNAN TIM PENGOLAH DATA PENYUSUNAN DOKUMEN ROAD MAP
 REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga
3.	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga
4.	Sekretaris Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga	Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga
5.	Kasubbag TU dan Perlengkapan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga	Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga
6.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga
7.	Kasubbag Keuangan pada Sekretariat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga
8.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga
10.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga
11.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga

1	2	3
12.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga
13.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga
14.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga
15.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
16.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga
17.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga
18.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga
19.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga
20.	Kasubbag Tata Usaha pada Sekretariat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga
21.	Kasubbag Kepegawaian dan Pengembangan Kapasitas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga
22.	Kasi Sarana Prasarana Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga
23.	Kasubbag Program dan Humas pada Bagian Tata Usaha RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga
24.	Kasubbag Tata Usaha pada Sekretariat RSKBD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga	RSKBD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga
25.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga	Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga
26.	Pelaksana Subbag Perencanaan pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
27.	Pelaksana Subbag Perencanaan pada Sekretariat Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga
28.	Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga

1	2	3
29.	Pelaksana Subbag Perencanaan pada Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga
30.	Pelaksana Subbag Perencanaan pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

BUPATI PURBALINGGA, *b*


DYAH HAYUNING PRATIWI *d 7*